

## Siaran Pers

# **PELUNCURAN BUKU PROYEKSI PENDUDUK INDONESIA 2015-2045 UNTUK PENGAMBILAN KEBIJAKAN BERBASIS DATA AKURAT**

**Jakarta** – Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla meluncurkan buku Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045 pada Jumat (24/8) di Istana Wakil Presiden, Jakarta. Acara tersebut dihadiri antara lain oleh para Menteri Kabinet Kerja, kepala lembaga, gubernur, akademisi, para pakar di bidang demografi, serta pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan buku Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045. Sejak 2016, dalam rangka memenuhi kebutuhan data untuk penyusunan rencana pembangunan baik di tingkat nasional maupun di daerah, Kementerian PPN/Bappenas dan Badan Pusat Statistik (BPS), dengan dukungan Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, juga pakar demografi, antara lain dari Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Institut Teknologi Bandung, dan Universitas Padjadjaran, telah menyusun Buku Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045 tersebut. Data dasar perhitungan proyeksi ini adalah hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015.

Mengacu pada SUPAS 2015, Indonesia mengalami perubahan struktur penduduk yang terjadi cukup cepat. Saat ini, masih berdasarkan data SUPAS 2015, *Tingkat Fertility Rate/TFR* adalah sebesar 2,28 dengan variasi yang cukup tinggi antar provinsi. Beberapa provinsi telah memiliki TFR di bawah 2 dan mengalami transisi yang cukup cepat. Namun, sebagian provinsi, terutama dari Indonesia Bagian Timur, TFR tercatat masih jauh di atas 2. Momentum ini perlu diantisipasi dengan kebijakan cermat yang diambil berdasarkan data proyeksi penduduk yang akurat. Di berbagai belahan dunia, proporsi usia produktif bervariasi terhadap tingkat ekonomi wilayah. Saat ini, proporsi penduduk usia muda di negara berpendapatan tinggi mengalami penurunan. Sementara itu, di negara berkembang termasuk di Indonesia, penduduk usia muda bergerak menuju puncaknya pada tahun 2030-an. Pada periode tersebut, proporsi penduduk usia muda di Indonesia akan jauh lebih tinggi dari rata-rata negara Asia Tenggara. Dalam buku Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045, asumsi-asumsi yang dibentuk berdasar pada data Sensus Penduduk dan SUPAS. Proyeksi penduduk Indonesia yang disajikan dalam publikasi ini mencakup pertumbuhan penduduk, perubahan struktur umur, dan distribusi penduduk menurut kelompok umur, jenis kelamin, dan provinsi mulai 2015 hingga 2045. Proyeksi penduduk dilakukan dengan menggunakan beberapa skenario yang didasari oleh berbagai asumsi. Berdasarkan hasil proyeksi, jumlah penduduk Indonesia pada 2025 diperkirakan mencapai sekitar 282 juta jiwa.

“Dalam Buku Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045, penduduk Indonesia pada 2045 diperkirakan berkisar antara 311–318,9 juta jiwa. Skenario pertama, apabila jumlah anak dibiarkan terus menurun dan TFR mencapai di bawah 2, maka total penduduk sekitar 311 juta jiwa. Skenario kedua, apabila TFR dapat dipertahankan di kisaran 2, jumlah penduduk diperkirakan berkisar pada 318,9 Juta. Pada saat itu, persentase penduduk lansia atau 60+ akan sebesar 19,85 persen sehingga Indonesia telah memasuki era baru, *ageing population*,” ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. Kerangka kependudukan dan pembangunan menempatkan penduduk sebagai sumber utama pertumbuhan ekonomi (*engine of growth*). Pengertian ini dapat diartikan dalam dua hal, yaitu penduduk sebagai konsumen dan penduduk sebagai produsen atau pelaku aktif pembangunan.

Dalam konteks Indonesia, ada dua hal penting untuk diperhatikan. *Pertama*, dengan jumlah penduduk yang relatif besar, penduduk Indonesia menjadi salah satu konsumen terbesar di dunia. Perubahan struktur penduduk yang cepat akan berpengaruh terhadap pola konsumsi, yang akhirnya akan berpengaruh terhadap kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi. *Kedua*, perubahan struktur penduduk di Indonesia membawa penduduk Indonesia dengan jumlah usia produktif yang paling besar di wilayah Asia Tenggara. Penduduk usia produktif tersebut selain memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui produksi mereka, juga melalui investasi yang dilakukan semasa usia produktif. Patut diingat, pertumbuhan penduduk yang seimbang dapat ditandai antara lain oleh dua indikator. *Pertama*, pertumbuhan penduduk perlu dijaga untuk tidak mencapai negatif dalam jangka panjang. Pengalaman negara maju yang telah mengalami *ageing* dengan jumlah anak yang terus menurun, pertumbuhan mereka sudah mencapai negatif, seperti halnya yang terjadi di Korea.

Kedua, *fiscal support ratio* yang menggambarkan kemampuan pemerintah untuk membiayai program pemerintah dari pendapatan pajak penduduk juga menjadi perhatian. Kebijakan kependudukan harus dapat menopang keseimbangan fiskal dalam jangka panjang. Dengan menjaga jumlah anak pada *replacement rate*, *fiscal support ratio* dapat terjaga dengan baik dalam jangka panjang. Sementara itu, apabila jumlah anak terus menurun, jumlah penduduk usia muda akan berkurang dan mengalami penuaan. Melalui skenario ini, *fiscal support ratio* diperkirakan akan mulai mengalami penurunan setelah 2030. Menurut pengalaman negara maju seperti Jepang dan Brasil, dengan TFR yang relatif rendah dan program jaminan sosial yang cukup baik, *fiscal support ratio* tercatat sudah sangat rendah dan terus menurun.

Perubahan struktur umur penduduk akan mendorong Indonesia memasuki era bonus demografi yang ditandai dengan tumbuhnya segmen populasi penduduk usia produktif. Kondisi ini akan menjadikan Indonesia sebagai negara dengan proporsi jumlah usia produktif paling besar di wilayah Asia Tenggara. Indonesia diperkirakan akan terus mengalami penurunan rasio ketergantungan hingga mencapai titik terendah di 2022. Pada saat itu, Indonesia akan didukung oleh 60 pekerja produktif untuk menopang sekitar 100 orang penduduk. Dengan dukungan tersebut, termasuk mendorong penduduk usia produktif untuk menginvestasikan pendapatannya, maka bonus demografi berpotensi untuk diraih sebesar-besarnya 0,6 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam jangka panjang, hal tersebut akan berpengaruh, baik terhadap pola konsumsi maupun produktivitas yang akhirnya dapat memberikan kontribusi yang lebih permanen terhadap ekonomi nasional.

Untuk itu, diperlukan upaya efektif dalam pemanfaatan bonus demografi. Kebijakan dan program perlu disusun untuk mendukung investasi sumber daya manusia (SDM) berdasarkan pendekatan siklus hidup karena setiap manusia akan mengalami fase prenatal, neonatal, *infant*, *early childhood*, anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia. Investasi SDM antara lain akan dilakukan melalui perluasan pendidikan menengah menyeluruh, peningkatan akses dan kualitas pendidikan tinggi, dan peningkatan keterampilan. Pencetakan generasi muda yang sehat dan cerdas akan mendorong mereka beranjak menjadi remaja aktif dan produktif. Selanjutnya, akan tercipta tenaga kerja yang berdaya saing dan produktif. Upaya lain dalam mengoptimalkan bonus demografi yaitu peningkatan investasi yang didukung dengan pengembangan produk tabungan, deposito, saham, dan instrumen investasi jangka panjang lainnya. Seluruh rencana akan berjalan dengan baik jika didukung dengan stabilitas politik dan ekonomi, sistem perbankan dan investasi yang mumpuni, cakupan jaminan sosial yang menyeluruh dan komprehensif, serta sistem pensiun yang berkesinambungan.

Persentase penduduk lanjut usia (60+) akan meningkat seiring terjadinya penurunan tingkat kelahiran dan peningkatan Umur Harapan Hidup dari tahun ke tahun. Hasil proyeksi menunjukkan persentase penduduk lanjut usia terhadap total penduduk akan meningkat dari sebesar 9,0 persen pada tahun 2015 menjadi sekitar 19,7–19,8 persen pada 2045. Pertumbuhan penduduk dunia pada 2050 akan kurang dari 0,2 persen per tahun. Pada periode yang sama, sebagian wilayah telah mengalami pertumbuhan negatif dan penuaan penduduk terjadi cepat di wilayah tersebut. Hanya Afrika yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi. United Nation Population Projection 2017 Revision memperlihatkan, pada 2045, Nigeria akan memiliki jumlah penduduk 371 juta, 60 juta lebih banyak dari Indonesia. “Indonesia perlu menjaga pertumbuhan penduduk agar seimbang dalam waktu yang panjang. Dalam hal ini, pemerintah perlu menyusun strategi baik dalam menjaga kuantitas maupun kualitas penduduk. Pertama adalah pertumbuhan penduduk dalam jangka panjang perlu dijaga untuk tidak mencapai angka negatif. Kedua, kebijakan kependudukan harus dapat menopang keseimbangan fiskal dalam jangka panjang. Dengan demikian, pertimbangan dalam kebijakan kependudukan akan sangat mempengaruhi masa depan Indonesia,” tegas Menteri Bambang.

Jakarta, 24 Agustus 2018

Parulian Silalahi  
Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan  
Kementerian PPN/Bappenas

Untuk informasi lebih lanjut:  
Kementerian PPN/Bappenas  
Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310  
Telepon: (021) 31936207, 3905650  
Faksimile: (021) 31901154  
Email: [humas@bappenas.go.id](mailto:humas@bappenas.go.id)